

Prosiding Seminar Nasional

Mengembangkan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam Berbasis SNPT ber-KKNI untuk Menghasilkan Lulusan yang Berdaya Saing Tinggi

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
Kerjasama
Forum Komunikasi Jurusan KI/MPI se-PTKIN/PTKIS
Makassar, 29-31 Juli 2016



Dr. H. Mulyono, M.A.

Prosiding Seminar Nasional

**MENGEMBANGKAN KURIKULUM MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS SNPT BER-KKNI
UNTUK MENGHASILKAN LULUSAN YANG
BERDAYA SAING TINGGI**

Editor:

Ahmad Afif

M. Yusuf Tahir

Makassar, 29 - 31 Juli, 2016

KERJASAMA



Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Forum Komunikasi
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam/
Kependidikan Islam PTKIN/PTKIS

**Prosiding Seminar Nasional
Mengembangkan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam
Berbasis SNPT Ber-KKNI Untuk Menghasilkan Lulusan yang
Berdaya Saing Tinggi**

Penulis:
Mulyono Dkk.

Penyunting:
**Ahmad Afiif
M. Yusuf Tahir**

Desain sampul dan Tata letak:
Rufaidah Lailah

ISBN: 978-602-74913-0-4

Cetakan Pertama, Agustus 2016

Penerbit:
Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Redaksi:
Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa
Telp. (0411) 424835, Fax. 424836
email: mpi.ftkuinam@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dzat yang membuat segala sesuatu menjadi niscaya dan mungkin dilakukan.

Upaya perbaikan pendidikan adalah substansi dari ide pembaruan dan pemajuan sektor pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia melalui sektor pendidikan pada hakikatnya menempatkan anak bangsa sebagai ujung tombak (*front liner*) untuk menempatkan bangsa ini tegak sebagai bangsa bermartabat di antara bangsa-bangsa lainnya. Melalui UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, orientasi pendidikan nasional telah merubah fundamental pendidikan itu sendiri dari etatisme ke pemberdayaan di mana unit terkecil pembelajaran berkekuatan untuk mengembangkan metode, strategi maupun taktik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan. Desentralisasi dibutuhkan agar koherensi berbagai faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran maujud, sinergis dalam efisiensi pencapaian tujuan umum pembelajaran.

Idealisasi demikian tentu tidak semudah menepuk tangan, tidak dengan *humpty dumpty*, tetapi membutuhkan suatu daya akademik dalam memahami kebutuhan global di sisi satu dan kebutuhan nasional di sisi lainnya. Globalisasi adalah sisi niscaya yang tidak dapat dihindari mengingat posisi negara Indonesia dalam percakapan internasional. Sementara untuk kepentingan nasional, adalah absurd menyerahkan pembudayaan generasi bangsa kepada sistem asing yang akan mengorbankan nasionalisme.

Melalui kumpulan tulisan ini diharapkan membuahakan ide, gagasan atau urun pikir bagi perbaikan penyelenggaraan pendidikan khususnya pada Program Studi Kependidikan Islam atau Manajemen Pendidikan Islam yang berguna bagi perbaikan perkuliahan secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan Temu Nasional IV Jurusan KI/MPI PTKAI 2016. Terima kasih kami kepada Rektor UIN Alauddin Makassar, Pengelola Prodi

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Alumni dan Mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Penghargaan khusus kepada Pengurus Forum Komunikasi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu, sekali *syukran wa jazakumullahu khairan katsiran*.

Makassar, 27 Juli 2016

**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar**

Dr. Muhammad Amri, Lc., M.Ag.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar __ iii

Daftar Isi __ v

BAGIAN I - KURIKULUM

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI MPI BERBASIS KKNI

Mulyono (UIN Maliki Malang) ∞ 1

PENGEMBANGAN KURIKULUM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA BERBASIS SNPT BER-KKNI DALAM
MENGHADAPI PERSAINGAN DUNIA KERJA

Subiyantoro (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ∞ 14

KURIKULUM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRESSIVE EMPOWERISTIC

(Pemikiran ke Arah Mutu Lulusan yang Kreatif Berdaya Saing)

Saiful Hadi (STAIN Pamekasan) ∞ 28

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODUL PERENCANAAN PENDIDIKAN
BERBASIS PENDEKATAN COOPERATIVE LEARNING

(Tuntutan Memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Fahrurrozi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) ∞ 47

PROFIL PRODI MPI PERSPEKTIF KKNI DAN SN-DIKTI

Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) ∞ 64

REKONSTRUKSI KURIKULUM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM:

Merancang Keunggulan Berbasis Stakeholder

Rusmini (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) ∞ 75

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PASCASARJANA
IAIN KENDARI BERBASIS KKNI

Ambar Sri Lestari (IAIN Kendari) ∞ 90

REFORMASI PENDIDIKAN ISLAM
Candra Wijaya (UIN Sumatera Utara) ∞ 103

KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Analisis tentang Hadis Iman, Islam dan Ihsan)
Muhammad Amri & La Ode Ismail Ahmad (UIN Alauddin Makassar) ∞ 111

BAGIAN II - KEPEMIMPINAN

BAURAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI
Hafulyon (IAIN Batusangkar) ∞ 139

PERBANDINGAN ANTARA *BURNOUT* PADA GURU MAN DAN
GURU SMUN DI SULAWESI SELATAN
Ulfiani Rahman (UIN Alauddin Makassar) ∞ 159

KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN MAHASISWA PADA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SMH BANTEN
Supardi (IAIN SMH Banten) ∞ 178

PENGARUH PENILAIAN PROSES OLEH DOSEN TERHADAP
KEDISIPLINAN MAHASISWA MENGIKUTI PERKULIAHAN PADA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Muhammad Yahya (UIN Alauddin Makassar) ∞ 191

KEPEMIMPINAN WIRAUSAHA KEPALA SEKOLAH DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG
M. Hasbi & Elimarisa (UIN Raden Fatah Palembang) ∞ 221

URGENSI KEPEMIMPINAN ISLAMI DALAM MENINGKATKAN
SEMANGAT DAN KINERJA PEGAWAI
Baharuddin (UIN Alauddin Makassar) ∞ 233

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENINGKATKAN MUTU LULUSAN
(Studi Kualitatif di SMK BM Swasta Sinar Husni)
M. Rifai (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) ∞ 256

BAGIAN III - MANAJEMEN PENDIDIKAN

MANAJEMEN PEMASARAN PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH
Fatkuroji (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) ❧ 277

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH
Jamaluddin Iskandar (UIN Alauddin Makassar) ❧ 299

MANAJEMEN STRATEGIK DALAM PENGUATAN PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI) FAKULTAS TARBIYAH,
DAN KEGURUAN (FTK) UIN AR RANIRY BANDA ACEH
Sri Rahmi (UIN Ar Raniry Banda Aceh) ❧ 311

ARAH DAN MASA DEPAN JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM:
Membangun Profil Lulusan Manajemen Pendidikan Islam yang Marketable
Berbasis KKNI
Samsu (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) ❧ 327

MANAJEMEN KELUHAN PELANGGAN PENDIDIKAN:
Studi Penanganan Keluhan Mahasiswa
Jamaluddin (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) ❧ 341

REKAYASA MASA DEPAN ISLAM (Perspektif Manajemen Pendidikan Islam)
Suarga (UIN Alauddin Makassar) ❧ 358

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Hasyim Asy'ari (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) ❧ 377

DEFINISI, DASAR DAN RUANG LINGKUP
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
Nur Zazin (STIT Darul Ulum Kotabaru) ❧ 392

PENGELOLAAN TERPADU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI MINORITAS MUSLIM PAPUA BARAT
Ismail Suardi Wekke, Siarni, Nuryantika (STAIN Sorong) ❧ 412

MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER
Hizbul Muflihah (IAIN Purwokerto) ❧ 426

TINJAUAN GLOBAL ATAS INOVASI DALAM
TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ERA PENGETAHUAN
(Sebuah Antisipatoris)

Muhammad Khalifah Mustami (UIN Alauddin Makassar) ❧ 441

Lampiran:

Jadwal Presentasi Makalah ❧ 459

Bagian I
KURIKULUM

MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MPI BERBASIS KKN

Mulyono

Ketua Jurusan MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
UIN Maliki Malang, HP. 081-334691166, Email: mulyojoyo@gmail.com

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan munculnya era yang dikenal dengan era globalisasi membawa berbagai dampak dalam kehidupan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak dalam era ini memberikan banyak sisi positif dalam kehidupan umat manusia. Namun di sisi lain, manusia sebagai subjek dan sekaligus objek dari proses perkembangan ini dituntut untuk semakin sigap dan tanggap dalam menyikapinya. Globalisasi dan internasionalisasi ekonomi dan ilmu pengetahuan misalnya menuntut mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan utamanya pendidikan tinggi menyikapinya dengan sungguh-sungguh. Dan hal ini ternyata sudah menjadi perhatian serius para pengelola perguruan tinggi di hampir seluruh belahan dunia. Pembicaraan tentang pendidikan yang berorientasi dunia kerja seakan sudah menjadi icon setiap perguruan tinggi¹.

Di Indonesia sendiri pengembangan kurikulum pendidikan tinggi diharapkan senantiasa mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat dalam artian bahwa lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan di masyarakat atau *stakeholders*. Acuan ini secara tegas menuntun perguruan tinggi untuk mampu menghadirkan kurikulum yang berorientasi dunia kerja.

Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada level Strata 1 di bawah Jurusan/Fakultas Tarbiyah di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Negeri maupun Swasta yang jumlahnya sekarang mencapai 60 prodi tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan cenderung terus meningkat seiring dengan lahirnya Prodi MPI baru. Secara umum Program studi MPI

¹ ochanbhancine.files.wordpress.com/, *Pengembangan Kurikulum Berorientasi Dunia Kerja*, [Online] Kamis, 19 Maret 2015.

memiliki visi untuk Menjadi Program Studi terdepan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan professional berkarakter religius/Islami yang mampu berdaya saing baik di level nasional, ASEAN maupun internasional.

Salah satu konsekuensi dari visi tersebut bahwa Program Studi MPI harus mengembangkan kurikulum sebagai landasan akademik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kurikulum yang dimaksud harus mencerminkan Program Studi MPI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan sekaligus kemampuan akademik untuk mengembangkan bidang Manajemen Pendidikan Islam yang memiliki ruang lingkup kajian bidang kepemimpinan, manajemen, dan administrasi pendidikan Islam dalam berbagai jenjang dan jenis Lembaga Pendidikan Islam.

Terkait dengan visi di atas, maka Program Studi MPI dituntut untuk dapat: (1) menyelenggarakan program pendidikan yang didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki daya kompetitif yang tinggi serta mampu mengembangkan profesionalitas dalam bidang MPI meliputi: kepemimpinan, administrasi, dan manajemen pendidikan Islam yang didukung dengan kompetensi bidang IT dan kewirausahaan, (2) menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan MPI yang profesional untuk pengelolaan pendidikan Islam, serta (3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam rangka memperkuat epistemologi dan struktur keilmuan (*body of knowledge*) Manajemen Pendidikan Islam.²

Perkembangan masyarakat yang pesat dan semakin kompleks sering berpengaruh pada perkembangan struktur keilmuan (*body of knowledge*) Manajemen Pendidikan Islam menyadarkan bahwa setiap saat Prodi MPI harus meninjau kembali (*review*) kurikulum sehingga proses pembelajaran yang diselenggarakan dapat menjamin standar kualitas lulusan yang *compatible* dengan perkembangan masyarakat serta tuntutan profesionalisme. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang manajemen pengembangan kurikulum Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

² Mulyono, dkk. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Integratif*. Laporan Penelitian. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 1-2.

B. Dasar Pemikiran Pemberlakuan KKNI

Dalam rangka untuk mengembangkan kurikulum pendidikan tinggi yang selaras dengan dunia kerja, maka pada tanggal 17 Januari 2012, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres No.8/2012) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Menurut Perpres Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

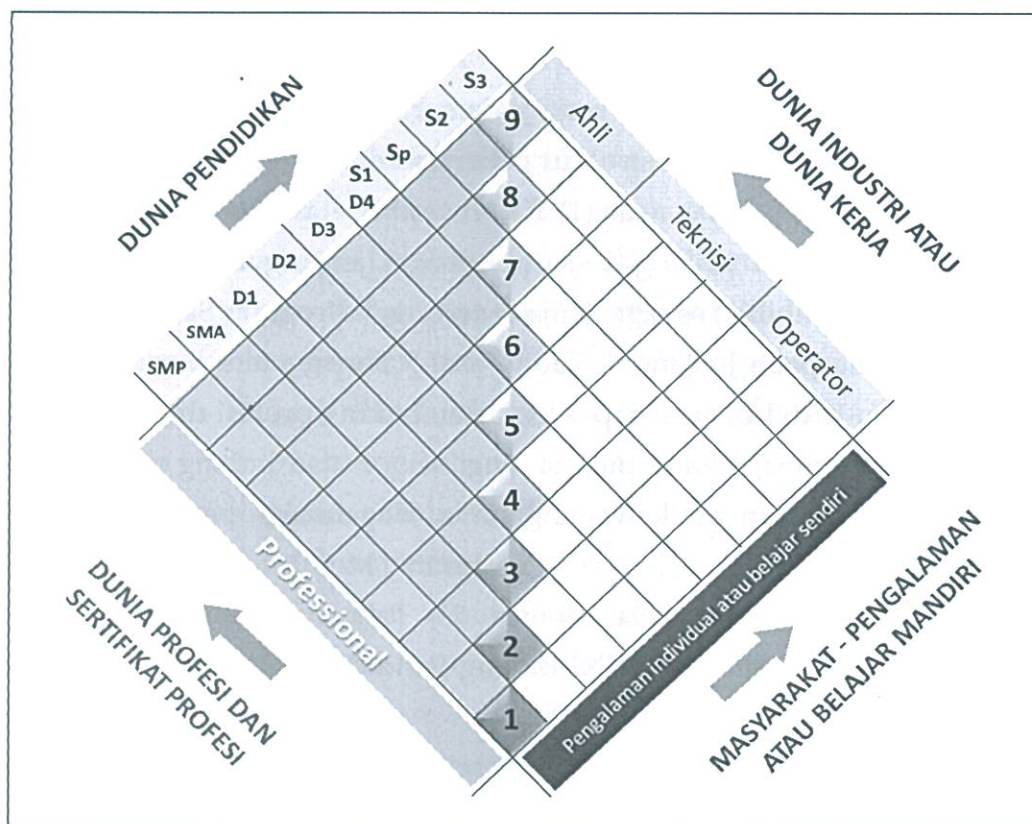
Sedangkan pada pasal 2 ayat (1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah samMPI dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV berada pada Jenjang 6. Pada Pasal 9 Perpres tersebut dinyatakan bahwa Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Bagaimana penerapan KKNI pada bidang Pendidikan Tinggi? Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 (Permendikbud No.73/2013) tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa:

Dalam menerapkan KKNI bidang pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang.
- 2) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- 3) Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program

studi.³

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka secara eksplisit program studi memiliki kewajiban merumuskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan secara berkesinambungan melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum sesuai dengan jenjang program studi.



Gambar 1. Pencapaian Level Kualifikasi melalui berbagai Alur

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

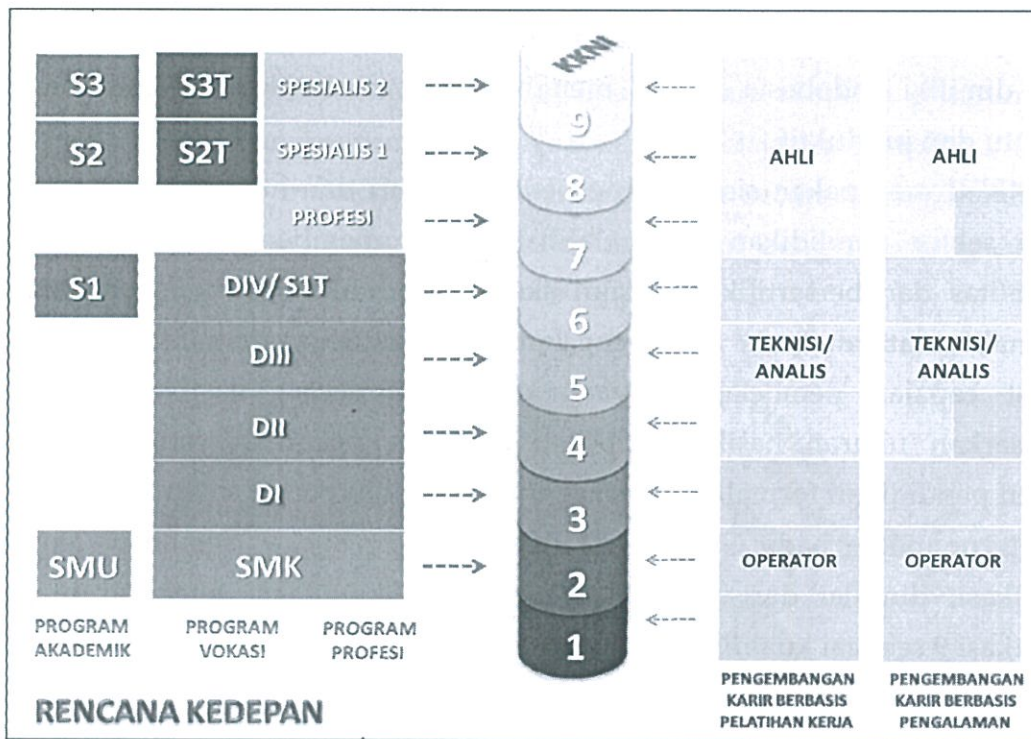
sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif.

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Setiap sektor dan jenjang pada KKNI memiliki deskriptor masing-masing. Deskriptor pada KKNI terdiri atas dua bagian yaitu deskripsi umum dan deskripsi spesifik. Deskripsi umum mendeskripsikan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia dan berlaku pada setiap jenjang. Sedangkan deskripsi spesifik mendeskripsikan cakupan keilmuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*know-how*) dan keterampilan (*skill*) yang dikuasai seseorang bergantung pada jenjangnya.⁴

Terbitnya Perpres No.08 tahun 2012 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program studi, tidak terkecuali prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di lingkungan Jurusan/Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan PTKIN/PTKIS di seluruh Indonesia. Kurikulum Prodi MPI yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi, kini harus mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang selaras dengan misi KKNI. Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik sumber daya manusia (SDM) Indonesia, seperti tertuang dalam gambar dibawah ini:

⁴ Kemendiknas, *Penyelarasan Kurikulum Berbasis KKNI*, [Tersedia] <http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/>, [Online] 20 Nopember 2014: 20.23 WIB.



Gambar 2. Penyebaran 9 (Sembilan) Level KKKNI

Dengan adanya pengembangan kurikulum berbasis KKKNI ini, Prodi MPI memberikan cara pandang kepada *stakeholders* maupun mahasiswa bahwa kompetensi seseorang, tidak lagi semata diukur melalui ijazah tetapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

Dalam pelaksanaannya, rumusan kurikulum KKKNI memuat 8 (delapan) tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka Kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan. Prodi MPI saat ini secara umum sedang menyempurnakan perumusan profil lulusan berdasarkan KKKNI yang dimaksud.

Seperti amanah KKKNI bahwa kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Berdasarkan muatan tersebut, apakah rumusan profil lulusan prodi MPI telah menggambarkan kompetensi seperti yang

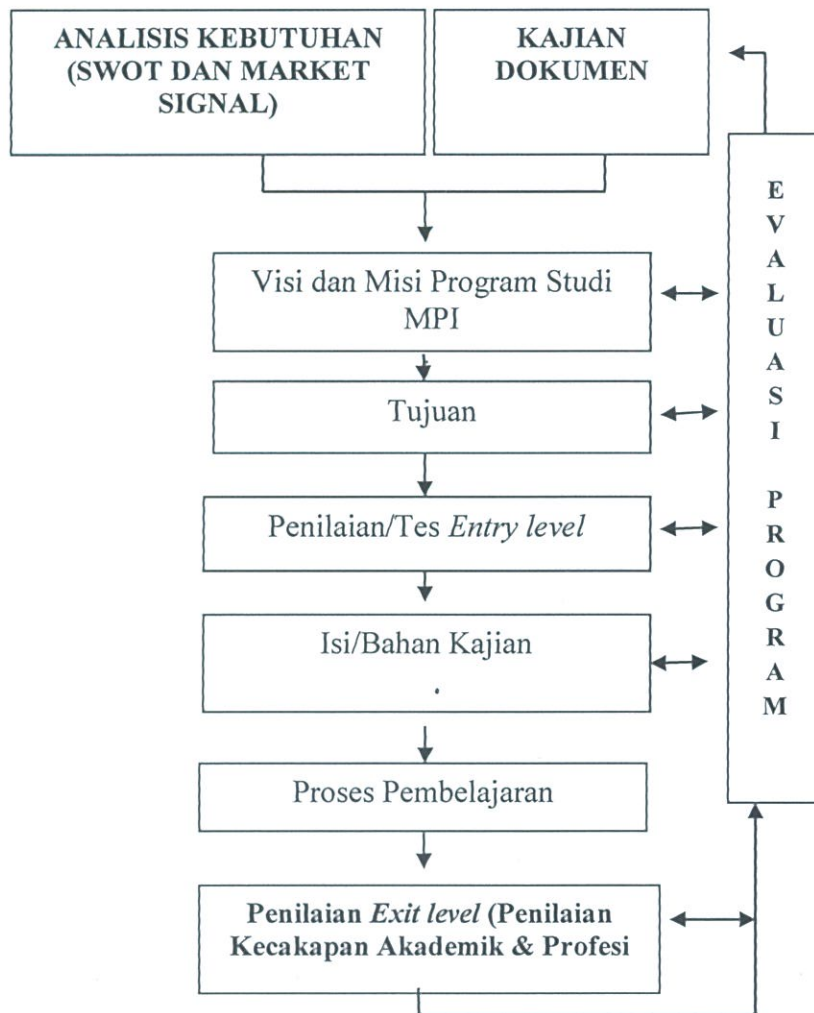
dimaksud KKNI.

Begitu halnya dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Apakah rumusan capaian pembelajaran prodi MPI di lingkungan PTKIN/PTKIS sudah standart KKNI?

C. Tahapan Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI

Tahapan pengembangan kurikulum Prodi MPI berbasis KKNI secara teoritik dapat mengadopsi salah satu model pengembangan kurikulum yang banyak dianut, yaitu model Tyler (Model Rasional) yang dimodifikasi oleh Brown (1996) sebagai *A Systemetic Approach to Program Development* (1995). Model ini kemudian diadaptasi sejalan dengan kelaziman pengembangan kurikulum yang merujuk kepada aspek juridis yang berlaku di Indonesia dan panduan penyusunan kurikulum yang disarankan DIKTI (2008). Tahapan dan komponen pengembangan kurikulum tersebut mencakup 6 komponen kurikulum yang antara satu komponen dengan komponen lainnya saling berkaitan. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.⁵

⁵ Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, *Draft 7 Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum UPI*, Bandung: UPI, 2012, hlm. 27-32.



Gambar 3. Tahapan Pengembangan Kurikulum Prodi MPI

Berdasarkan gambar di atas tahapan pengembangan kurikulum Program studi MPI harus melalui tahapan berikut:

1. Kajian dokumen dan pustaka. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai kajian pustaka yang berkaitan landasan filosofis, sosiologis, historis dan juridis yang relevan, antara lain, konsep Redesian Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, kajian rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan termasuk standar nasional pendidikan untuk perguruan tinggi seperti standar isi dan proses, kurikulum sekolah/madrasah yang akan menjadi stakeholder, kaji banding dokumen

kurikulum program studi sejenis baik dari perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri.

2. Analisis Kebutuhan. Dalam analisis ini dilakukan: *Pertama*, analisis situasi kajian berbagai aspek yang menyangkut SDM, mahasiswa, sarana, prasarana, dan daya dukung kependidikan lainnya yang dimiliki oleh Program studi. *Kedua*, analisis kebutuhan mahasiswa ketika mereka memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya (*market signal*) menyangkut pengetahuan, keterampilan termasuk keterampilan berpikir, sikap dan kepribadian. Pendeknya menyangkut kajian aspek *hardskills* dan *softskills* yang dibutuhkan mereka ketika memasuki dunia kerja agar mampu beradaptasi dan mengembangkan profesinya.
3. Rumusan visi dan misi program studi dikembangkan berdasarkan analisis di atas dan merujuk pula pada visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Rumusan tujuan pendidikan pada program studi dalam bentuk rumusan Profile Lulusan (*outcome*) dan kompetensi lulusan (*output*) yang merupakan pengejawantahan dari hasil analisis kebutuhan dan kajian dokumen serta pustaka berdasarkan Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum.
5. *Entry level test* (penilaian terhadap kemampuan akademik, pengetahuan dan keterampilan pedagogik, serta karakteristik lain calon peserta didik) dilakukan guna memetakan secara lebih awal pengetahuan, keterampilan, dan keperibadian calon peserta didik/mahasiswa yang akan memasuki Program studi MPI. Hasilnya dapat memberikan masukan bagi rancangan program penyetaraan (*fine tuning program*), dapat berupa matrikulasi atau program persiapan bersama agar terjadi "penyamaan" terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sejalan dengan tuntutan kurikulum program studi.
6. Pemilihan dan pengorganisasian konten kurikulum program studi. Pengorganisasian konten ini juga didasarkan pada hasil analisis dan kajian di atas serta Profile dan kompetensi lulusan. Bahan kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk mata kuliah dan bahan ajar dengan menerapkan pendekatan koheren (konten kurikulum berupa mata kuliah dalam kelompok mata kuliah harus saling menunjang dalam membentuk dan menghasilkan kompetensi lulusan) dan proporsional (pemilihan dan

pengorganisasian konten sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan).

7. Rancangan pembelajaran dan pengembangan pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik/mahasiswa. Rancangan pembelajaran yang disusun dalam kurikulum didistribusikan ke dalam setiap semester yang didasarkan pada keterpaduan antara pembelajaran konsep, prinsip, dan teori kependidikan dan pembelajaran dengan hasil kajian terhadap praktek pembelajaran dan praktek manajemen/administrasi pada *setting* nyata di instansi/lembaga pendidikan.
8. Penilaian kecakapan akademik dan profesi dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik/mahasiswa telah atau belum memenuhi kerangka kualifikasi lulusan program studi (*exit level*). Penilaian diarahkan baik proses maupun hasil belajar peserta didik. Untuk program studi MPI penilaian merujuk pada kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, manajerial, dan sosial secara terpadu.
9. Evaluasi kurikulum. Evaluasi pada Program studi MPI didasarkan pada pendekatan *Context, Input, Process, Product dan Outcomes (CIPO)*. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh tingkat efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum yang harus dielaborasi dan dikaitkan pula pada pembinaan profesi berkelanjutan. Dari sisi konteks, evaluasi ditujukan pada identifikasi landasan yang digunakan dalam merumuskan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan. Landasan ini mencakup baik yuridis, akademis maupun empiris melalui analisis kebutuhan. Dari sisi input, evaluasi diarahkan pada penggunaan sumber daya baik manusia, biaya, dan sarana dalam mewujudkan pencapaian tujuan atau kompetensi lulusan. Evaluasi sisi proses diarahkan pada kajian semua prosedur operasi baku yang dikembangkan dalam menopang proses pembelajaran untuk memaksimalkan pencapaian kompetensi atau tujuan yang hasilnya digunakan sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan baik pada tingkat prodi, jurusan, fakultas dan universitas dalam memperbaiki implementasi kurikulum. Dari sisi produk, evaluasi difokuskan pada penilaian (baik kecakapan akademik maupun profesi lulusan) dan penafsirannya pada akhir program sebagai salah satu bagian dalam menentukan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program. Dari sisi *outcomes*, evaluasi diarahkan

pada penilaian kinerja lulusan di dunia yang hasilnya dapat digunakan bagi penentuan kebijakan dalam pola pembinaan atau pengembangan profesi berkelanjutan (*continous professional development*) dan masukan bagi perbaikan kurikulum secara berkesinambungan.

D. Manajemen Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Program Studi

Sebagai lembaga eksekutor atau pelaksana kegiatan akademik terdepan dari kebijakan dan ketetapan Universitas, Program studi MPI memobilisasi dan mengkoordinasikan seluruh staf dosen dalam penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran pada bidang MPI. Dalam hal ini, ada sejumlah aktivitas yang perlu dirancang dan direalisasikan oleh Program studi, yakni: (a) mengkoordinasikan implementasi kurikulum yang berlaku dalam bentuk penjabaran ke dalam bentuk pemetaan Kerangka Kualifikasi Lulusan (KKL) (sebagaimana dirinci dalam Panduan dan Rambu-rambu Pengembangan Kurikulum di tingkat Universitas/Fakultas) yang dinyatakan dalam rumusan gabungan antara kompetensi dengan substansi keilmuan penciri program studi yang bersangkutan, Deskripsi, Silabus, satuan acara perkuliahan (SAP) dan Perangkat Evaluasi yang diperlukan secara komprehensif dan sinergis; (b) sesuai dengan rambu-rambu yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Universitas, Program studi segera melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang terintegrasi dan berkesinambungan antara program pendidikan S1, S2, S3, dan program pendidikan profesi; (c) melakukan kajian-kajian penelitian dan aktivitas pengembangan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan inovasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidikan pada Program studi MPI; (d) merancang dan mengimplementasikan program pembinaan dan pengembangan SDM yang mendukung terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas.

Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan seperti program pendidikan *degree* dan/atau *short course* yang relevan bagi para dosen, baik di dalam maupun di luar negeri, penerapan sistem penugasan yang rasional dan proporsional, penerapan sistem *reward* dan *punishment* yang adil dan bijaksana, dan penganggaran kegiatan melalui rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT) Program studi yang mengakomodasi keperluan aktivitas pengembangan diri dan profesionalisme dosen (penyediaan dana untuk

pelatihan, seminar, penulisan buku, dan sebagainya); (e) menyelenggarakan program dan sistem pendidikan pendidik dan tenaga pendidikan dengan sepenuhnya berpedoman pada sistem akademik yang berlaku dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kurikulum; (f) dengan koordinasi universitas, mengembangkan jejaring dan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak terkait di dalam dan di luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pemantapan kinerja dan profesionalisme lulusan di lapangan melalui pola pembinaan dalam model pengembangan profesi berkelanjutan (*continous professional development*); dan (g) mengembangkan budaya akademis dan iklim kerja yang mendukung proses penyelenggaraan pendidikan guru yang berkualitas. Untuk menunjang manajemen implementasi kurikulum pada tingkat program studi yang menekankan pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran berkelanjutan (*continous quality improvement*), standarisasi semua kegiatan akademik atau implementasi kurikulum harus dilakukan. Ini dilakukan baik dengan mengadopsi standar yang berlaku di lingkungan Perguruan tinggi masing-masing maupun standar internasional melalui ISO.⁶

Secara umum, implementasi kurikulum Program studi berbasis KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.⁷

E. Penutup

Deskripsi umum KKNI tentang penguasaan konsep teoritis bidang MPI secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang MPI tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah

⁶ Dikembangkan dari Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, *Draft 7 Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum UPI*, Bandung: UPI, 2012, hlm. 35-36.

⁷ Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemendiknas, *Konsep Dasar KKNI*, Juli 2010, diupload oleh Fauzi Eko Pranyono, 2 Juli 2012. [Tersedia] <http://fauziep.com/>, [Online] Selasa, 01 Desember 2015.

prosedural, kurikulum prodi MPI telah dirumuskan empat hal, yaitu (1) penguasaan landasan dan wawasan MPI, (2) penguasaan substansi Kajian MPI, (3) penguasaan pembelajaran MPI dan implementasinya di lapangan, (4) penguasaan keterampilan dan menggerakkan pengembangan lembaga pendidikan Islam (LPI), dan (5) penguasaan manajerial dan kepemimpinan dalam (merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan) pengembangan Instansi/Lembaga Pendidikan Islam.

Kelima hal di atas merupakan indikator terukur yang dibutuhkan calon lulusan MPI yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja. Penguatan kompetensi lulusan MPI, khususnya profesional dan kepemimpinan mendapat aksentuasi yang lebih besar lagi selaras dengan tujuan KKNI.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pendidikan Tinggi, Kemendiknas, *Konsep Dasar KKNI*, Juli 2010, diupload oleh Fauzi Eko Pranyono, 2 Juli 2012. [Tersedia] <http://fauziep.com/>, [Online] Selasa, 01 Desember 2015.
- Kemendiknas, *Penyelarasan Kurikulum Berbasis KKNI*, [Tersedia] <http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/>, [Online] 20 Nopember 2014: 20.23 WIB.
- Mulyono, dkk. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Integratif*. Laporan Penelitian. Malang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- ochanbhancine.files.wordpress.com/, *Pengembangan Kurikulum Berorientasi Dunia Kerja*, [Online] Kamis, 19 Maret 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
- Tim Pengembang Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, *Draft 7 Naskah Akademik Pengembangan Kurikulum UPI*, Bandung: UPI, 2012.